

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dan Gambaran Umum Desa

Penelitian ini melakukan penelitian di 3 desa, yaitu Desa Wonokerto Kecamatan Turi (Desa Maju), Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan (Desa Mandiri), dan Desa Selomartani Kecamatan Kalasan (Desa Mandiri).

1. Kondisi Geografis

a) Desa Wonokerto

Desa Wonokerto merupakan salah satu bagian dari wilayah desa di Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 15,58 Km² dan kepadatan penduduk 652 per Km². Secara geografis Desa Wonokerto terletak pada 7 °58'53.7 LS dan 110 °22'24.0 BT. Desa Wonokerto berbatasan dengan:

- a. Desa Girikerto Kecamatan Turi di sebelah utara.
- b. Desa Girikerto Kecamatan Turi di sebelah timur.
- c. Desa Srumbung Kabupaten Magelang di sebelah barat.
- d. Desa Donokerto Kecamatan Turi di sebelah selatan.

b) Desa Tamanmartani

Desa Tamanmartani merupakan salah satu bagian dari wilayah desa di Kabupaten Sleman tepatnya pada kecamatan Kalasan dengan luas wilayah 74.480 Ha. Secara geografis Desa Tamanmartani terletak pada -7,738671 LS dan 110,482750 BT. Adapaun desa Tamanmartani berbatasan dengan:

- a. Desa Sindumartani di sebelah utara
- e. Wilayah Klaten di sebelah timur.
- b. Desa Bokoharjo di sebelah barat
- f. Desa Tirtomartani dan Desa Selomartani di sebelah selatan.

c) Desa Selomartani

Desa Selomartani merupakan salah satu bagian dari wilayah desa di Kabupaten Sleman tepatnya pada kecamatan Kalasan dengan

luas wilayah 896,00 Ha. Secara geografis Desa Tamanmartani terletak pada 110,462250 BT dan -7,725173 LS. Desa Selomartani berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara Desa Widodomartani
- b. Sebelah timur Desa Tamanmartani
- c. Sebelah selatan Desa Tortomartani, Desa Purwomartani, dan Desa Tamanmartani
- d. Sebelah barat Desa Wedomartani.

2. Kondisi Demografis

Komposisi Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin diterangkan dalam tabel 1.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani Tahun 2019

No	Desa	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Wonokerto	5.026	5.060	10.086
2	Tamanmartani	8.122	8.357	16.479
3	Selomartani	6.599	6.712	13.311

Sumber: Prodeskel Kemendagri 2019

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Desa Wonokerto cukup seimbang. Begitu pula dengan desa Tamanmartani dan Selomartani yang memiliki penduduk laki-laki dan perempuan yang cukup seimbang. Namun dari ketiga desa tersebut jumlah kepadatan penduduk Desa Tamanmartani memiliki angka yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk 16.479 jiwa, ini disebabkan Desa Tamanmartani memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan kedua desa lainnya.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dari Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani yang telah berdomisili sejak sebelum adanya Dana Desa. Jumlah responden Sembilan puluh orang, yang

mana tiga puluh orang berasal dari ketiga desa tersebut. Masyarakat yang menjadi responden adalah mereka yang menikmati atau menggunakan fasilitas umum yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah desa setempat. Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, status, usia, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, penduduk asli, dan tahun domisili masyarakat. Data karakteristik responden tersebut dapat dilihat pada uraian tabel berikut 4.2 ini.



Tabel 4.2. Karakteristik Responden

Karakteristik Demografi	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	39	43%
	Perempuan	51	57%
Usia	15-40	45	50%
	41-64	44	49%
	>64	1	1%
Status Pernikahan	Menikah	72	80%
	Belum menikah	18	20%
Pendidikan	SD	4	4%
	SMP	24	27%
	SMA	23	26%
	>SMA	39	43%
Pekerjaan	Petani	19	21%
	Pedagang	16	18%
	Karyawan	15	17%
	Pelajar	6	7%
	Lainnya	17	19%

Sumber: Data Primer (2019)

Pada tabel di atas diketahui bahwa responden yang diwawancarai berjenis kelamin perempuan dengan 51 jumlah responden atau 57%, sedangkan laki-laki sebanyak 39 responden atau 43%. Menurut usia, responden dengan rata-rata usia 15-40 tahun mendominasi dengan 45 jumlah responden atau 50%, sedangkan 44 responden berada di atas 41-65 tahun dengan 49%. Berdasarkan status pernikahan sebanyak 72 responden sudah menikah atau 80%, sedangkan 18 responden lainnya atau 20% responden belum menikah.

Pada tingkat pendidikan, 4 persen responden diantaranya adalah lulusan SD, 27% lulusan SMP, 26% lulusan SMA dan sederajatnya.

Pekerjaan responden didominasi oleh petani dengan jumlah 19 responden atau 21%, kemudian lainnya dengan 17 responden atau 19%, pedagang dengan 16 responden atau 18%. karyawan dengan 15 responden atau 17%, dan pelajar dengan 6 responden 7%.

C. Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Pengelolaan manajemen Dana Desa merupakan langkah untuk dapat meningkatkan pembangunan desa secara berkelanjutan. Pembangunan desa sendiri merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah agar desa-desa di Indonesia tidak tertinggal dari pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan manajemen Dana Desa yang baik, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi tentunya akan membuat Dana Desa dari tahun ke tahun akan semakin efektif dalam penggunaannya. Berikut ini uraian setiap tahapan manajemen Dana Desa yang dilakukan oleh ketiga desa tersebut.

1. Tahap Perencanaan

Desa Wonokerto, Tamanmartani dan Selomartani memiliki kesamaan dalam perencanaan APBDes tahun 2019 yang mulai direncanakan pada tahun 2018 atau direncanakan pada tahun sebelumnya. Proses dari perencanaan APBDes tahun 2019 diambil dari pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan).

Tahap manajemen perencanaan APBDes di Desa Wonokerto, Tamanmartani dan Selomartani, telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku yang mana telah diawali dengan adanya pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan yang dilakukan menggunakan model partisipatif dalam musrembang. Tim pelaksana tersebut terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku

Kepala Urusan Keuangan (KUK), dan kemudian dibantu oleh lembaga masyarakat di desa.

Perencanaan model partisipatif yang dilakukan melalui musrembang telah melibatkan seluruh masyarakat yang terdiri dari lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat. Adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) tersebut bertujuan agar dapat mendorong masyarakat agar turut aktif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa. Sehingga nantinya rencana kegiatan yang telah tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) merupakan gambaran dari kebutuhan masyarakat setempat.

Jadi mengenai proses manajemen Dana Desa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di ketiga desa tersebut, yaitu Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani. Pemerintah desa akan terlebih dahulu menyusun sebuah tim pelaksanaan, yang mana dalam tim tersebut akan terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa. Setelah tim tersebut terbentuk proses selanjutnya adalah tahap penyusunan perencanaan anggaran.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Wonokerto yaitu Bapak Tomon Haryo Wirosobo mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan:

“Dalam mekanisme pembangunan di desa inikan ada tahapannya, dari musyawarah dusun, kemudian ada musyawarah desa, kemudian ada musrembang, kemudian ada penyusunan RKP/RKA dan pada akhirnya menjadi RAPBDes. Itu semua merupakan prosedur yang harus kita lalui dengan melibatkan masyarakat dari awal, artinya semua pihak akan terlibat dalam perencanaan anggaran ini.”

Kemudian Bapak Toni Nugroho selaku Sekretaris Desa Tamanmartani menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat di Desa Tamanmartani dalam tahap perencanaan:

“Ketika masuk masa penyusunan RPJM itu kan sebelumnya diawali dengan adanya musyawarah dusun nanti diakumulasi bisa menjadi RPJM itu. Nanti dimusyawarahkan di desa juga. Kemudian setiap tahun juga ada lagi MUSDUS yang dilakukan oleh BPD itu juga dalam rangka merencanakan ini secara kebersamaan dengan masyarakat tidak hanya perangkat desa saja.”

Selanjutnya Ibu Nur Widayati menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan:

“Pada dasarnya Dana Desa memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan. Peranan masyarakat dalam proses perencanaan ini sangat lah penting keberadaannya, karena masyarakat akan menyebutkan apa yang sekiranya mereka butuhkan untuk kesejahteraan hidupnya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh masyarakat cukup baik, dengan selalu hadir dalam penyusunan anggaran, baik itu RPJM ataupun RKP yang sifatnya tahunan mereka selalu ikut aktif dalam proses perencanaan ini.”

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini Desa Wonokerto, Tamanmartani dan Selomartani memiliki perbedaan dari segi pendapatan dan pengeluaran yang membuat alokasi dana nya berbeda-beda. *Pertama*, pada tahun 2019 ini Desa Wonokerto menerima transfer total pendapatan sebesar Rp. 5.116.297.656 yang mana angka ini merupakan angka pendapatan terbesar desa dari 4 tahun belakangan

ini. Dalam pelaksanaannya Desa Wonokerto membaginya ke dalam

No	Uraian/kegiatan	Pendapatan	Pengeluaran	Persentase
1	Alokasi Dana Desa (ADANA DESA)	1.676.715.000		
2	Dana Desa (DANA DESA)	1.249.387.000		
3	Bagi Hasil Pajak (BHP)	416.727.956		
4	Pendapatan Asli Desa (PAD)	85.717.700		
5	BKK dari Provinsi	940.000.000		
6	BKK dari Kabupaten	747.750.000		
7	Penyelenggaraan Pemerintah		1.213.811.941	32,41%
8	Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.765.033.450	52,16%
9	Pembinaan Masyarakat		417.222.250	7,25%
10	Pemberdayaan Masyarakat		849.860.950	8%
11	Bidang bencana Darurat Desa		8.768.428	0,14%
	Jumlah	5.116.297.656	4.254.697.019	99,82%

4 bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan serta pengeluaran Desa Wonokerto pada tahun 2019 dirangkum dalam tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Pendapatan dan Pengeluaran Desa
Wonokerto**

Sumber: Kantor Desa Wonokerto 2019 (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 3, seluruh rencana yang telah disusun oleh Desa Wonokerto telah terlaksana dengan baik. Rencana tersebut telah terlaksana 99,82% dengan uraian persentase penyelenggaraan pemerintah 32,41%, pelaksanaan pembangunan desa 52,61%, pembinaan masyarakat 7,25%, pemberdayaan masyarakat 8%, dan bidang darurat bencana 0,14%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan pembangunan mendapatkan proporsi angka tertinggi yaitu 52,61%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang ada di Desa Wonokerto menjadi prioritas, serta sangat gencar dilakukan untuk dapat membantu percepatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kedua, pada tahun 2019 Desa Tamanmartani menerima transfer total pendapatan sebesar Rp. 5.853.284.200. Sama seperti Desa Wonokerto, Desa Tamanmartani dalam pelaksanaannya memiliki 4 bidang yang sama. Pendapatan serta pengeluaran Desa Tamanmartani pada tahun 2019 dirangkum dalam tabel 4.4

No	Uraian/kegiatan	Pendapatan	Pengeluaran	Persentase
1	Alokasi Dana Desa (ADANA DESA)	2.018.711.000		
2	Dana Desa (DANA DESA)	1378.418.750		
3	Bagi Hasil Pajak (BHP)	820.940.000		
4	Pendapatan Asli Desa (PAD)	344.496.000		
5	BKK dari Provinsi /PBK	1.232.718.450		
6	Pendapatan lain-lain	58.000.000		
7	Penyelenggaraan Pemerintah		1.999.191.330	34%
8	Pelaksanaan Pembangunan Desa		2.817.518.750	48%
9	Pembinaan Masyarakat		748.050.000	13%
10	Pemberdayaan Masyarakat		238.525.000	4%
11	Bidang Tak Terduga		50.000.000	1%
	Jumlah	5.853.284.200	5.853.285.080	99,96%

Tabel 4.4. Pendapatan dan Pengeluaran Tamanmartani

Sumber: Kantor Desa Tamanmartani 2019 (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 4, seluruh rencana yang telah disusun oleh Desa Tamanmartani telah terealisasi dengan baik. Rencana tersebut telah terlaksana 99,96% dengan uraian persentase penyelenggaraan pemerintah 34%, pelaksanaan pembangunan desa 48%, pembinaan masyarakat 13%, pemberdayaan masyarakat 4%, dan bidang tak terduga 1%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan pembangunan fisik merupakan pemilik angka tertinggi dengan 48% itu menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang ada di Desa Tamanmartani telah menjadi prioritas utama, serta sangat gencar dilakukan untuk dapat membantu percepatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketiga, Desa Selomartani pada tahun 2019 ini menerima transfer total pendapatan sebesar Rp. 5.795.284.200 yang mana pembagian kedalam 4 bidang sama seperti desa yang lainnya. Berikut merupakan pendapatan serta pengeluaran Desa Tamanmartani pada tahun 2019 dirangkum dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5. Pendapatan dan Pengeluaran Desa Selomartani

No	Uraian/kegiatan	Pendapatan	Pengeluaran	Persentase
1	Alokasi Dana Desa (ADANA DESA)	1.630.000.000		
2	Dana Desa (DANA DESA)	1.200.649.000		
3	Bagi Hasil Pajak (BHP)	400.000.000		
4	Pendapatan Asli Desa (PAD)	253.500.000		
5	BKK dari Provinsi dan Kab	753.470.000		
6	Penyelenggaraan Pemerintah		1.952.658.800	40,16%
7	Pelaksanaan Pembangunan Desa		2.153.960.200	44,31%
8	Pembinaan Masyarakat		351.210.000	7,22%
9	Pemberdayaan Masyarakat		381.290.000	7,84%
10	Bidang Penanggulangan bencana		22.500.000	0,46%
	Jumlah	5.795.284.200	5.853.285.080	99,99%

Sumber: Kantor Desa Selomartani 2019 (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 5, seluruh rencana yang telah disusun oleh Desa Selomartani telah terlaksana dengan baik. Yang mana rencana tersebut telah terlaksana 99,99% dengan uraian persentase penyelenggaraan pemerintah 40,16%, pelaksanaan pembangunan desa 44,31%, pembinaan masyarakat 7,22%, pemberdayaan masyarakat 7,84%, dan bidang penanggulangan bencana 0,46%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan

pembangunan infrastruktur merupakan pemilik angka tertinggi dengan 44,31% itu menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang ada di Desa Tamanmartani sudah menjadi prioritas desa, serta sangat gencar dilakukan untuk dapat membantu percepatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

3. Tahap Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Dana Desa di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani dalam tahap evaluasi dan pertanggungjawaban secara garis besar memiliki kesamaan, ini disebabkan ketiga desa ini telah mengikuti aturan dan format yang telah ditentukan oleh pemerintah. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang desa dipaparkan bahwa dalam proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa mengemban tugas untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku yang dilakukan setiap akhir bulan secara tertib. Serta bendahara memiliki tugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan diserahkan kepada kepala desa selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan laporan APBDes diserahkan kepada kepala desa yang kemudian disampaikan kepada bupati/walikota yang berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Laporan realisasi APBDes diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli, sedangkan laporan semester akhir tahun diserahkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Bapak Tomon Haryo Wirosobo selaku Kepala Desa menjelaskan mengenai laporan dan evaluasi bahwa:

“Evaluasi akhir kita sama ya seperti yang lain. Karena kalau evaluasi itu sendiri kan kita ada aturannya dari pusat atau pedomannya. Kita ada rapat untuk penyusunan LPJ kemudian ada rapat mengenai apa kendala selama pelaksanaannya seperti

itu. Kalau tahap pembentukan LPJ itu sendiri kita udah ada aturannya ya dari pemerintah pusat. Jadi kita gabisa macem-macem lah bahasanya. Karena semua sudah diatur dengan sistem, kita tinggal input-input saja data yang ada kemudian kita kirim ke pusat. Adapun bentuk hard copy nya kita cetak untuk dokumentasi desa serta kita serahkan kepada bupati/walikota untuk transparansi kepada mereka dan masyarakat.”

Kemudian Bapak Toni Nugraha dari Tamanmartani pun menjelaskan mengenai laporan dan evaluasi.

“Kalau dari kami ya cuma melakukan monitoring dengan kita melihat hasilnya secara langsung dan mengukur volume pekerjaannya sudah sesuai itu bisa dikatakan pekerjaannya sudah selesai dengan baik. Adapula instansi lain yang ikut turun untuk meninjau langsung hasil pekerjaan daripada Dana Desa itu tadi seperti inspektorat dll. Jika masih ada kekurangan pihak tersebut akan memberikan saran dan kemudian kita kembalikan ke TPK perihal kekurangan tersebut untuk diperbaiki. Kemudian ketika sudah selesai ada pelaporan masing-masing saja. Yang nantinya akan digabungkan dalam LPPD dalam laporan akhir tahunan bersama dana-dana yang lainnya. Setelah itu laporan anggaran akan kita serahkan ke Kabupaten. Kalau dari LPJ sendiri sudah ada ketentuan dan formatnya sendiri dari pusat ya. Jadi semua sudah mengikuti sistem yang ada, tidak ada sistem yang kita buat sendiri karna mengingat ini adalah perintah dari pusat.”

Selanjutnya pendapat Ibu Nur Widayati tentang evaluasi dan pertanggungjawaban.

“proses pelaporan pertanggungjawaban atau LPJ wajib untuk disusun setiap akhir tahun anggaran. Sebelum diserahkan ke Kabupaten LPJ tersebut disampaikan terlebih dulu ke musyawarah desa yang mana diadakannya pula perencanaan pembangunan ditahun yang akan datang.”

Pernyataan dari ketiga narasumber tersebut telah menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah desa setelah terealisasinya pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam proses LPJ nya tersebut. Desa memang harus menyiapkan LPJ tersebut untuk diinformasikan kepada masyarakat desa agar masyarakat mendapatkan transparansi mengenai proses manajemen keuangan desa yang didiaminya. Kemudian menjelaskan tentang mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi Dana Desa. Pentingnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar nantinya proses LPJ ini berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak terlambat pada waktunya.

D. Kemiskinan Spiritual Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa

Pembangunan seharusnya berdampak pada kebutuhan material dan spiritual. Peneliti mencoba mengukur kemiskinan spiritual berdasarkan nilai SV (*spiritual value*) dalam indeks kemiskinan CIBEST. Berikut adalah hasil penelitian dari kuesioner yang disajikan secara global pada tabel 4.6 dan tabel 4.7.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Indikator Garis Kemiskinan Spiritual Sebelum Dana Desa

No	Desa	Range Indikator				
		Sholat	Puasa	Zakat dan infaq	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah

1	Wonokerto	3,8	4,0	4	3,9	4,3
2	Tamanmartani	4,0	3,9	4,1	3,8	3,7
3	Selomartani	3,9	3,8	4,1	3,8	4,0

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Indikator Garis Kemiskinan Spiritual Setelah Dana Desa

No	Desa	Range Indikator				
		Sholat	Puasa	Zakat dan infaq	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah
1	Wonokerto	4,4	4,4	4,5	4,3	4,5
2	Tamanmartani	4,6	4,6	4,5	4,3	4,4
3	Selomartani	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4

Sumber: Data Primer (2019)

Dari Statistik Deskriptif Indikator Garis Kemiskinan Spiritual kelima indikator skala likert tersebut, akan diuraikan pada tabel dan paragraf berikut

1. Sholat

Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang menganutnya. Sholat juga merupakan ibadah yang dilakukan hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan kepada nya melalui setiap gerakannya. Berikut adalah hasil penelitian indikator sholat yang diperoleh di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani sebelum adanya Dana Desa sebagai berikut.

No	Desa	Range	Rata-rata
1	Wonokerto	3-5	3,8

2	Tamanmartani	3-5	4,0
3	Selomartani	3-5	3,9

**Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Indikator Ketaatan Sholat
Sebelum Dana Desa**

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan dalam tabel 4.8 di atas diketahui pada indikator sholat nilai garis spiritualitas sholat memiliki skala minimal 3 dan skala maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada ketiga desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Tamanmartani memiliki rata-rata tertinggi yaitu 4,0. Kemudian diikuti oleh Desa Selomartani dengan rata-rata 3,9 dan yang terakhir Desa Wonokerto dengan angka rata-rata sebesar 3,8. Dari ketiga nilai rata-rata tersebut praktis ketiga desa berada di atas garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual), karena nilai rata-ratanya berada di atas standar yaitu angka 3 yang menandakan responden Desa Tamanmartani, Wonokerto, dan Selomartani mampu melaksanakan sholat wajib secara rutin walaupun tidak secara berjamaah. Akan tetapi pada ketiga desa tersebut masih terdapat beberapa individu yang memberikan angka 3 yang berarti melaksanakan sholat namun tidak secara rutin.

Kemudian berikut adalah hasil penelitian indikator sholat setelah adanya Dana Desa dan pembangunan desa.

**Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Indikator Ketaatan Sholat
Setelah Dana Desa**

No	Desa	Range	Rata-rata
1	Wonokerto	3-5	4,4
2	Tamanmartani	4-5	4,6
3	Selomartani	4-5	4,7

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan pada tabel 4.9 di atas diketahui bahwa pada indikator sholat setelah adanya Dana Desa mengalami peningkatan pada jawaban skala likert nya dengan nilai minimal 4 dan nilai maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada hasil ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pada indikator sholat masyarakat dengan angka terendah pada desa Wonokerto yaitu 4,4 dan yang paling tertinggi Desa Selomartani dengan angka 4,7. Hasil itu menandakan bahwa pada saat hadirnya Dana Desa, ketiga desa tersebut berada di atas angka garis kemiskinan spiritual. Ketiga desa tersebut berada pada garis kaya spiritual yang menandakan tidak ada responden yang meninggalkan sholat dan selalu menjaga sholat lima waktunya secara rutin, bahkan mampu menjalankannya dengan disertai sholat sunnah, karena semakin membaiknya akses untuk beribadah serta sarana tempat ibadah yang memadai untuk kegiatan ibadah responden.

2. Puasa

Puasa merupakan kegiatan ibadah umat Islam dengan menahan hawa nafsu serta makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Islam mengajarkan puasa kepada pemeluknya dengan tujuan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengendalikan nafsu, melipatgandakan pahala ibadah, dan meningkatkan rasa syukur atas segala kemudahan syariat Allah. Berikut adalah hasil penelitian indikator puasa yang diperoleh di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani sebelum adanya Dana Desa sebagai berikut.

Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Indikator Ketaatan Ibadah Puasa Sebelum Dana Desa

No	Desa	Range	Rata-rata
----	------	-------	-----------

1	Wonokerto	3-5	4,0
2	Tamanmartani	3-5	3,9
3	Selomartani	3-5	3,8

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan dalam tabel 4.10 di atas diketahui pada indikator puasa nilai garis spiritualitas sholat memiliki skala minimal 3 dan skala maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada ketiga desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Wonokerto memiliki rata-rata tertinggi yaitu 4,0. Kemudian diikuti oleh Desa Tamanmartani dengan rata-rata 3,9 dan yang terakhir Desa Selomartani dengan angka rata-rata sebesar 3,8. Dari ketiga nilai rata-rata tersebut terlihat ketiga desa tersebut berada di atas garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual), karena nilai rata-ratanya berada di atas standar yaitu angka 3 yang menandakan responden Desa Wonokerto, Tamanmartani dan Selomartani mampu melaksanakan puasa wajib secara rutin walaupun tidak secara penuh.

Kemudian berikut adalah hasil penelitian indikator puasa setelah adanya Dana Desa dan pembangunan desa.

Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Indikator Ketaatan Ibadah Puasa Setelah Dana Desa

No	Desa	<i>Range</i>	Rata-rata
1	Wonokerto	4-5	4,4
2	Tamanmartani	4-5	4,6
3	Selomartani	4-5	4,6

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan pada tabel 4.11 di atas diketahui bahwa pada indikator puasa setelah adanya Dana Desa mengalami peningkatan pada jawaban skala likert nya dengan nilai minimal 4 dan nilai maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada hasil ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pada indikator puasa responden dengan angka terendah pada desa Wonokerto yaitu 4,4 dan yang paling tertinggi dengan angka rata-rata yang sama pada Desa Selomartani dan Tamanmartani dengan angka 4,6. Hasil itu menandakan bahwa pada saat hadirnya Dana Desa, ketiga desa tersebut berada di atas angka garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual). Ketiga desa tersebut berada pada garis kaya spiritual yang menandakan tidak ada responden yang meninggalkan puasa wajib dan selalu mampu melaksanakan puasa sunnah bagi beberapa individu.

3. Zakat dan Infaq

Zakat dan infaq merupakan suatu kegiatan muamalah yang mana dengan cara mengeluarkan harta dan pendapatannya untuk sebuah kepentingan yang telah diperintahkan oleh Islam. Pada amalan zakat memiliki nisab tertentu untuk menunaikannya, akan tetapi pada infaq tidak ada batasan nishab tertentu dalam melaksanakannya. Berikut adalah hasil penelitian indikator zakat dan infaq yang diperoleh di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani sebelum adanya Dana Desa sebagai berikut.

No	Desa	Range	Rata-rata
1	Wonokerto	3-5	4
2	Tamanmartani	3-5	4,1

3	Selomartani	3-5	4,1
---	-------------	-----	-----

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Indikator Amalan Zakat dan Infaq Sebelum Dana Desa

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan dalam tabel 4.12 di atas diketahui pada indikator zakat dan infaq nilai garis spiritualitas memiliki skala minimal 3 dan skala maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada ketiga desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Tamanmartani dan Selomartani memiliki rata-rata tertinggi dengan angka sama yaitu 4,1. Kemudian diikuti oleh Desa Wonokerto dengan rata-rata 4. Dari ketiga nilai rata-rata tersebut praktis ketiga desa tersebut berada di atas garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual), karena nilai rata-ratanya berada di atas standar yaitu angka 3 yang menandakan masyarakat Desa Wonokerto, Tamanmartani dan Selomartani mampu menunaikan zakat fitr dan zakat harta. Namun masih ada masyarakat yang bahkan tidak mampu berinfaq walupun satu kali dalam satu tahun dengan jumlah 20 responden.

Kemudian berikut adalah hasil penelitian indikator zakat dan infaq setelah adanya Dana Desa dan pembangunan desa.

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Indikator Amalan Zakat dan Infaq Setelah Dana Desa

No	Desa	Range	Rata-rata
1	Wonokerto	4-5	4,5
2	Tamanmartani	4-5	4,5
3	Selomartani	4-5	4,5

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan pada tabel 4.13 di atas diketahui bahwa pada indikator zakat dan infaq setelah adanya Dana Desa mengalami peningkatan pada jawaban skala likert nya dengan nilai minimal 4 dan nilai maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada hasil ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pada indikator zakat dan infaq pada Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani memiliki nilai rata-rata angka yang sama yaitu 4,5. Hasil itu menandakan bahwa pada saat hadirnya Dana Desa, ketiga desa tersebut semakin berada di atas angka garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual). Ketiga desa tersebut berada pada garis kaya spiritual yang menandakan responden mampu untuk menunaikan zakat fitrah dan zakat harta, serta beberapa individu mampu untuk melakukannya disertai dengan infaq dan sodaqoh.

4. Lingkungan Keluarga

Lingkungan dan keluarga merupakan suatu yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan bersosial masyarakat. Lingkungan dan keluarga yang baik apabila tidak adanya intervensi untuk melakukan suatu ibadah di dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah hasil penelitian indikator lingkungan keluarga yang diperoleh di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani sebelum adanya Dana Desa sebagai berikut.

Tabel 4.14. Statistik Deskriptif Indikator Dukungan Lingkungan Keluarga Sebelum Dana Desa

No	Desa	Range	Rata-rata
1	Wonokerto	3-5	3,9
2	Tamanmartani	3-5	3,8
3	Selomartani	3-5	3,8

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan dalam tabel 4.14 di atas diketahui pada indikator lingkungan keluarga nilai garis spiritualitas lingkungan keluarga memiliki skala minimal 3 dan skala maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada ketiga desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Wonokerto memiliki rata-rata tertinggi yaitu 3,9. Kemudian diikuti oleh Desa Tamanmartani dan Selomartani dengan nilai rata-rata sama yaitu 3,8. Dari ketiga nilai rata-rata tersebut praktis ketiga desa tersebut berada di atas garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual), karena nilai rata-ratanya berada di atas standar yaitu angka 3 yang menandakan responden Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani telah mampu membangun suasana keluarga yang mendukung secara ibadah. Bahkan masih banyak individu yang menganggap ibadah merupakan urusan pribadi anggota keluarga dengan jumlah 26 responden.

Kemudian berikut adalah hasil penelitian indikator lingkungan keluarga setelah adanya Dana Desa dan pembangunan desa.

Tabel 4.15. Statistik Deskriptif Indikator Dukungan Lingkungan Keluarga Setelah Dana Desa

No	Desa	Range	Rata-rata
1	Wonokerto	4-5	4,3
2	Tamanmartani	3-5	4,3
3	Selomartani	4-5	4,4

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan pada tabel 4.15 di atas diketahui bahwa pada indikator lingkungan keluarga setelah adanya Dana Desa mengalami peningkatan pada jawaban skala likert nya dengan nilai minimal 4

dan nilai maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada hasil ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pada indikator lingkungan keluarga masyarakat dengan angka terendah pada Desa Wonokerto dan Tamanmartani yaitu 4,3 dan yang paling tertinggi dengan angka rata-rata pada Desa Selomartani yaitu 4,4. Hasil itu menandakan bahwa pada saat hadirnya Dana Desa, ketiga desa tersebut berada di atas angka garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual). Ketiga desa tersebut berada pada garis kaya spiritual yang menandakan sebagian responden telah mendukung ibadah anggota keluarganya dan dapat membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama. Akan tetapi masih terdapat 2 responden yang berpendapat bahwa ibadah merupakan urusan pribadi anggota keluarganya.

5. Kebijakan pemerintah

Pemerintah desa dalam perannya memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat agar dapat menjalankan kehidupannya dengan nyaman dan aman. Berikut adalah hasil penelitian indikator kebijakan pemerintah yang diperoleh di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani sebelum adanya Dana Desa sebagai berikut.

Tabel 4.16 Statistik Deskriptif Indikator Peran Kebijakan Pemerintah Sebelum Dana Desa

No	Desa	Range	Rata-rata
1	Wonokerto	3-5	4,3
2	Tamanmartani	3-5	3,7
3	Selomartani	3-5	4,0

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan dalam tabel 4.16 di atas diketahui pada indikator kebijakan pemerintah nilai garis spiritualitas kebijakan

pemerintah memiliki skala minimal 3 dan skala maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada ketiga desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Wonokerto memiliki rata-rata tertinggi yaitu 4,3. Kemudian diikuti oleh Desa Selomartani dengan rata-rata 4,0 dan yang terakhir Desa Tamanmartani dengan angka rata-rata sebesar 3,7. Dari ketiga nilai rata-rata tersebut praktis ketiga desa tersebut berada di atas garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual), karena nilai rata-ratanya berada di atas standar yaitu angka 3 yang menandakan pemerintah dari masing-masing desa mampu mendukung ibadah dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah masyarakatnya. Sedangkan pemerintah Desa Tamanmartani masih berada pada garis kemiskinan spiritual karena angka rata-ratanya tidak lebih dari 3 yang berarti pemerintah menganggap ibadah merupakan urusan pribadi masyarakat tanpa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk masyarakat.

Kemudian berikut adalah hasil penelitian indikator kebijakan pemerintah setelah adanya Dana Desa dan pembangunan desa.

Tabel 4.17 Statistik Deskriptif Indikator Peran Kebijakan Pemerintah Setelah Dana Desa

No	Desa	Range	Rata-rata
1	Wonokerto	3-5	4,5
2	Tamanmartani	3-5	4,4
3	Selomartani	3-5	4,4

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan pada tabel 4.17 di atas diketahui bahwa pada indikator kebijakan pemerintah setelah adanya Dana Desa mengalami peningkatan pada jawaban skala likert nya dengan nilai minimal 4 dan nilai maksimal 5 dari masing-masing desa. Pada hasil ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pada indikator

kebijakan pemerintah masyarakat dengan angka terendah pada Desa Selomartani dan Tamanmartani yaitu 4,4 dan yang paling tertinggi dengan angka rata-rata pada Desa Selomartani yaitu 4,5. Hasil itu menandakan bahwa pada saat hadirnya Dana Desa, ketiga desa tersebut berada di atas angka garis kemiskinan spiritual (kaya spiritual). Ketiga desa tersebut berada pada garis kaya spiritual yang menandakan sebagian pemerintah desa telah mendukung ibadah masyarakatnya dan dapat menciptakan lingkungan ibadah yang kondusif untuk masyarakatnya.

E. Keterkaitan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Manajemen Dana Desa merupakan suatu proses yang akan membawa desa semakin membaik kedepannya. Manajemen Dana Desa berperan untuk memberikan kemudahan kepada aparatur desa untuk dapat mengelola Dana Desa yang diterimanya agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak salah sasaran. Mulai dari pembentukan tim hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban harus dilaksanakan demi terciptanya desa yang maju dan mandiri oleh suatu desa. Tidak lupa juga transparansi kepada masyarakat desa tentang pengelolaan Dana Desa juga harus diperhatikan dengan bijak. Agar dana masyarakat tersebut dapat dilihat dan dipahami oleh masyarakat untuk apa saja dana tersebut digunakan.

Manajemen Dana Desa yang ada di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani sudah cukup baik dalam tahapan pengelolaannya. Telah sesuai dengan prosedur yang ada dimulai dari pembentukan tim kerja, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut juga ditinjau langsung oleh pemerintah pusat dengan diakuinya Sleman menjadi Kabupaten yang sukses mengelola Dana Desa. Kemudian Desa Tamanmartani dan Selomartani pun menjadi desa acuan yang patut menjadi contoh untuk manajemen Dana Desa yang baik. Salah satu yang menjadi indikator pemerintah dalam menilai ketiga desa ini memiliki manajemen yang baik adalah dengan melihat pendapatan Dana Desa dari tahun ke

tahun. Berikut adalah pendapatan Dana Desa dari 2015-2017 yang dirangkum dalam tabel berikut.



Tabel 4.18 Pendapatan Dana Desa

No	Desa	Tahun Anggaran		
		2015	2016	2017
1	Wonokerto	333.112.000	768.403.000	987.099.000
2	Tamanmartani	327.264.000	738.443.000	947.698.000
3	Selomartani	326.314.000	733.575.000	941.296.000

Sumber: Kab. Sleman 2019 (*data diolah*)

Berdasarkan pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa grafik pendapatan Dana Desa dari ketiga desa tersebut selalu mengalami kenaikan dari setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman, terutama ketiga desa tersebut sangatlah baik dalam mengelola manajemen Dana Desanya, sehingga pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar 10% kepada ketiga desa tersebut sangat sesuai harapan dengan prioritas Dana Desa menuju pembangunan desa maju dan mandiri yang ditetapkan pemerintah.

Pada tahun 2014-2015 saat awal-awal adanya Dana Desa di Indonesia, dapat dikatakan sangatlah jauh dari kata baik. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Aris Saputro selaku Kabid PPA II Kanwil DJPb bahwa “*Pada awalnya Dana Desa mengalami banyak permasalahan baik teknis maupun non teknis. Hal tersebut mulai dari permasalahan regulasi, permasalahan pelaksanaan, hingga permasalahan SDM yang ada pun menjadi kendala. Kemudian setelah ditemukan permasalahan-permasalahan tersebut dibuatlah regulasi dan undang-undang baru yang memperkuat hukum dan proses yang ada di Dana Desa. Hasilnya seperti yang kita dapati pada tahun 2018 sudah menurunnya angka permasalahan tersebut dan desa-desa pun menunjukkan progress yang semakin meningkat dalam manajemen Dana Desanya. Oleh karena itu pentingnya untuk*

mengawal Dana Desa oleh masyarakat dan pemerintah agar dana yang diberikan tersebut dapat bermanfaat dan tepat sasaran untuk kemajuan desa.”

Pada tahun 2019 ini terbukti manajemen yang ada di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani mampu dikatakan semakin membaik manajemennya, hal ini disebabkan adanya edukasi dari pemerintah, adanya pengawalan dari masyarakat, dan pengalaman perangkat desa dalam mengelola Dana Desa ini. Sehingga hal-hal tersebut tentunya wajib untuk ditingkatkan dan dipertahankan guna menyongsong pembangunan desa yang maju dan mandiri di tahun yang akan datang.

F. Pembahasan

1. Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Dari data yang didapat oleh peneliti diketahui bahwa pendapatan di ketiga desa di Kabupaten Sleman ini mendapatkan besaran dana yang berkisar diangka Rp. 4.237.619.000 – Rp. 5.853.248.200 per desa yang mana hasil tersebut telah dihitung melalui jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi ekonomi. Sedangkan penggunaan Dana Desa di ketiga desa ini paling dominan digunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur desa, yang mana disusul dengan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa proses perencanaan Dana Desa di ketiga desa tersebut sudah sangat bagus dan baik, hal itu disebabkan dengan turut aktifnya masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, baik itu RPJM ataupun DURK yang merupakan usulan dan kebutuhan dari masyarakat. Mulai dari Musrembang hingga musdu masyarakat sudah mampu untuk mengikuti alur tersebut dan dari tahun ke tahun semakin membaik perkembangannya. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Pitri, 2018) dikatakan bahwa dalam tahap perencanaan ini masih kurang efektif yang

disebabkan dengan tidak berjalan dengan baiknya proses musrembang desa yang dilakukan di Kecamatan Natar tersebut, sehingga menyebabkan penyusunan RPJM dan DURK akan terganggu dan tidak sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut.

Berikutnya hasil yang peneliti temukan terkait prioritas Dana Desa diketiga desa tersebut sudah baik perencanaannya. Pada dasarnya prioritas Dana Desa tersebut adalah suatu kebijakan dari pemerintah pusat untuk dapat diikuti kepada seluruh desa dan sifatnya akan berubah-ubah dari tahun ke tahun. Apabila prioritas Dana Desa tersebut sudah dilakukan maka silahkan untuk digunakan untuk kepentingan desa masing-masing. Diketiga desa ini sudah sesuai dengan prioritas desa nya masing-masing, dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur tentunya akan mempunyai hasil yang nyata dan dapat digunakan langsung oleh seluruh masyarakat desa. Berbeda dengan apa yang diteliti oleh (Riyani, 2016) di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang menyebutkan dari sebagian rencana pembangunan yang ada, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan adanya pembengkakan dana sehingga menimbulkan volume pembangunannya pun berkurang.

Pada tahapan manajemen pelaksanaan Dana Desa diketiga desa tersebut yang fokus pembangunannya pada bidang pembangunan infrastruktur desa sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Peneliti menemukan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh ketiga desa tersebut telah mencapai angka di atas 90% dari masing-masing desa. Desa Wonokerto telah melakukan 52,16% realisasi pembangunan di desanya dari 99,82% total pengeluaran yang ada. Kemudian dari desa Tamanmartani telah melakukan 48% realisasi pembangunan di desanya dari total 100% total pengeluaran yang diterbitkan oleh pemerintah desa Tamanmartani. Selanjutnya desa terakhir yaitu Desa Selomartani yang telah melakukan pengeluaran sebesar 44,31% dari total 99,99%

pengeluaran yang dilakukan desa secara keseluruhan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Moh. Sofiyanto et al., n.d.) pada Desa Banyuates Kabupaten Sampang, nilai anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Banyuates sebesar Rp. 311.588.250. pengeluaran yang dilakukan oleh Desa Banyuates pada bidang pembangunan fisik yaitu sebesar Rp.233.691.175 yang mana sisanya dialokasikan kepada bidang pemberdayaan masyarakat. Dari jumlah tersebut adanya perbedaan nominal jika dibandingkan dengan ketiga desa peneliti, yang mana setiap desa melakukan pembangunan fisik dengan anggaran mencapai angka Rp.1.765.033.450 hingga Rp.2.817.518.750 atau 44%-52% dari total pendapatan desa.

Dengan demikian pada tahapan manajemen pelaksanaan Dana Desa guna memperbaiki dan meningkatkan bidang pembangunan desa, diketiga desa tersebut telah berjalan dan terealisasi dengan baik. Akan tetapi yang harus tetap menjadi evaluasi dalam proses perencanaan tersebut adalah, harus tetap berperan aktifnya masyarakat sebagai juru evaluasi langsung yang dapat mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, agar Dana Desa dapat berguna sesuai dengan sasarannya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wulandari, 2016) ditemukan bahwa di Desa Gondosari kabupaten Pacitan terdapat kendala dalam proses pertanggungjawabannya. Mulai dari petugas pengelola kegiatan (TPK) terlambat dalam menyerahkan LPJ nya kepada Petugas Teknik Pelaksana Kegiatan Desa (PTPKD). Ketika pekerjaan sudah selesai direalisasikan namun laporannya tak kunjung dibuat hingga berbulan-bulan dengan alasan menumpuknya beban kerja yang dimiliki. Namun kendala tersebut tidak ditemukan didalam ketiga desa peneliti, khususnya Desa Tamanmartani. Pada saat kegiatan pelaksanaan telah terealisasi kemudian langsung disusun laporan-laporannya yang kemudian digabungkan kedalam LPPD kedalam laporan akhir tahunan

bersamaan dengan dana-dana yang lainnya, kemudian apabila laporan telah siap akan diserahkan ke Kabupaten di tahun berikutnya tanpa adanya keterlambatan yang terjadi.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Liando, Lambey, & Wokas, 2017) terdapat kendala-kendala yang cukup menghambat proses pertanggungjawaban Dana Desa. Kualitas SDM menjadi kendala yang cukup berarti di Desa Kolongan ini, dimulai dari kualitas SDM nya, faktor usianya, faktor pendidikan yang rendah, bahkan masih aparat desa sendiripun masih kurang memahami bagaimana teknis pembuatan LPJ. Tentunya jika ditinjau dari banyaknya kendala yang terjadi di Desa Kolongan Kabupaten Minahasa tersebut merupakan minimnya tingkat pendidikan SDM yang menyebabkan seluruh proses pertanggungjawaban tidak dapat berjalan dengan baik. Jika dibandingkan dengan apa yang ada di Desa Tamanmartani dan Selomartani tentunya kendala tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada di kedua desa tersebut. Desa Tamanmartani dan Selomartani memiliki kualitas dalam melakukan proses LPJ dengan baik dan benar, sehingga dijadikan sebagai acuan pusat dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Helmizar selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) yang menyatakan ke-4 desa di Sleman telah memiliki proses manajemen yang baik, karena Pemkab Sleman telah menjalankan koordinasi yang baik dengan pendamping desa. Kemudian telah menjaga koordinasi yang baik pula dengan pihak inspektorat sebagai fungsi pengawasan. Dari hal-hal tersebut terciptalah kinerja manajemen yang baik sehingga ke-4 desa di Sleman tersebut menjadi percontohan ataupun acuan dalam melakukan manajemen Dana Desa.

Jadi jika berbicara keterkaitan antara manajemen Dana Desa dengan pembangunan desa pasti akan memiliki keterkaitan satu sama lain. Pertama, manajemen Dana Desa yang baik akan menghasilkan

pembangunan desa yang baik, sebaliknya jika manajemen nya buruk maka pembangunan nya pun akan mengikuti. Kedua, manajemen Dana Desa tidak akan ada apabila tidak ada kegiatan yang direncanakan pada desa, maka dari itu pembangunan desa merupakan kegiatan yang dapat menyokong adanya manajemen Dana Desa. Ketiga, pembangunan desa tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak ada manajemen Dana Desa yang dikelolanya, pentingnya perencanaan hingga titik evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan Dana Desa yang digunakan tepat pada sasaran dan masyarakat dapat menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupannya.

2. Pembangunan desa dan Garis Kemiskinan Spiritual Masyarakat

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari sembilan puluh responden, didapatkan bahwa garis kemiskinan spiritual masyarakat secara total meningkat (kaya spiritual). Setidaknya peningkatan yang terjadi di setiap indikator menunjukkan bahwa dengan adanya Dana Desa yang kemudian dikelola untuk pembangunan akan membuat masyarakat lebih kaya secara spiritual (Todaro, 2003). Hal tersebut terjadi karena adanya pembangunan fisik di desa yang sifatnya berkelanjutan, yang menyebabkan pembangunan fisik di desa semakin tahun semakin membaik dan membuat aktivitas perekonomian masyarakat semakin baik. Hal tersebut tentunya diawali dengan adanya proses manajemen Dana Desa yang baik untuk menghasilkan pembangunan desa yang baik pula. Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani menggunakan setengah atau 50% dari pendapatan yang ada untuk dialokasikan pada pembangunan fisik desa. Mengingat pula pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dari prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan langsung oleh Kemendesdesa.

Masyarakat setelah adanya Dana Desa mengalami peningkatan pada indeks kemiskinan spriritualnya menjadi kaya spiritual. Kegiatan spiritual masyarakat ini meningkat kepada seluruh indikator.

Berdasarkan percakapan singkat peneliti dengan masyarakat, mereka lebih meningkatkan ibadahnya karena sebagai bentuk rasa syukurnya atas apa yang telah mereka nikmati di desa ini. Selain itu perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakatnya pun membuat masyarakat memiliki keterampilan dan kesejahteraan untuk dirinya masing-masing dengan adanya pembangunan desa tersebut. Kemudian akan dimulainya fokus pemerintah kepada bidang pemberdayaan agar angka pengangguran di desa semakin menurun dan pendapatan masyarakat desa semakin meningkat (Kemendesa, 2018).

Pembangunan desa yang terealisasi seperti, jembatan, jalan rusak, talud irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan yang lainnya harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh masyarakat yang menikmati fasilitas tersebut. Masyarakat setelah mampu meningkatkan hal spiritualnya (kaya spiritual) harus juga dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan pembangunan yang ada. Apabila bekerja sebagai petani dapat memanfaatkan jalan yang ada untuk dapat mendistribusikan hasilnya ke tempat lain dan memanfaatkan talud irigasi yang ada dengan baik untuk kepentingan pertanian bersama. Kemudian apabila pedagang, manfaatkanlah fasilitas seperti jalan untuk dapat bertransaksi dengan baik dan halal. Apabila pelajar dan pekerja, manfaatkanlah jalan dan jembatan yang ada untuk beraktivitas dengan lancar dan selamat guna meningkatkan tingkat pendidikan yang ada di desa. Apabila memiliki potensi seperti desa wisata manfaatkanlah segala potensi yang ada dengan mengangkat kearifan dan tradisi local yang dapat menjadi ciri khas bagi para pengunjung, selain itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara bertahap.

Tentu harapannya dari adanya pembangunan yang telah terealisasi pada empat tahun belakangan ini membuat masyarakat senantiasa mempertahankan atau bahkan meningkat perilaku

spiritualitasnya melalui sholat, puasa, zakat dan infaq. Hal ini tentunya untuk kemajuan masyarakat desa bersama, apabila seluruh fasilitas yang ada apabila digunakan dengan baik dan semestinya maka akan menjadi sesuatu yang baik pula begitupun sebaliknya. Oleh karena itu masyarakat dengan aparatur desa tetap menjalin komunikasi yang baik mengenai apa yang dibutuhkan untuk tahun-tahun mendatang agar desa-desa peneliti ini semakin membaik dan menjadi desa yang patut untuk dicontoh baik dalam hal manajemen pembangunan desanya ataupun perilaku spiritualitas masyarakatnya.

